

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pemerintahan Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (2) Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

##### **2. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan kontrak antara pihak prinsipal yang menunjuk pihak agen untuk mengelola dan menjalankan amanah yang telah diberikan oleh prinsipal. Teori keagenan memberikan dampak positif berupa efisiensi namun juga terkadang berfokus pada asimetri informasi yaitu pihak agen biasanya cenderung memiliki informasi yang lebih dominan daripada pihak prinsipal. Hal tersebut dikarenakan pihak agen secara langsung terjun ke lapangan sehingga mengetahui keseluruhan informasi. Berbeda dengan pihak

prinsipal sebagai pemilik dan pengontrol yang akan cenderung memiliki sedikit informasi daripada pihak agen.

Berdasarkan penelitian Jensen and Meckling (1976) menyatakan bahwa perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan. Hal tersebut juga berlaku pada instansi pemerintahan, dimana pihak prinsipal yaitu rakyat memberikan amanah kepada aparatur pemerintah (agen) untuk mengelola dana yang dimiliki. Konflik keagenan yang pernah terjadi pada pemerintahan yaitu antara pemerintah dengan masyarakat, seperti penelitian Feyzioglu *et al.* (1998) dalam Abdullah dan Asmara (2006) menemukan bahwa ketika bantuan luar negeri ditujukan untuk peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah akan menggeser alokasi dana yang sebelumnya sudah disiapkan untuk sektor pendidikan ke sektor lain. Ketika bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung investasi publik, pemerintah tetap mempertahankan alokasi dana yang telah disiapkan untuk investasi tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu contoh teori keagenan antara prinsipal (masyarakat) dengan agen (pemerintah).

Untuk menyelesaikan permasalahan antara prinsipal dengan agen, maka membutuhkan laporan keuangan yang relevan dan akuntabel sebagai alat monitoring. Penyajian laporan keuangan tersebut harus berdasarkan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Standar penyajian laporan keuangan pemerintah saat ini harus sudah

mengacu pada PP No 71/2010 yaitu mengimplementasikan *Full Accrual Basic*, sehingga dapat menyajikan Laporan Keuangan (*Financial Reports*) yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasi (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK) serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), menyajikan Laporan Pelaksanaan Anggaran (*Budgetary Reports*) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL) berbasis *full accrual*.

### 3. Teori Signal (*Signalling Theory*)

Teori signal (*signalling theory*) menjelaskan bahwa organisasi pemerintah berusaha untuk memberikan signal kepada masyarakat, yaitu salah satunya dengan cara menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan lebih terperinci. Hal tersebut bertujuan agar rakyat sebagai prinsipal tetap percaya serta mendukung program-program kerja pemerintah sebagai pemangku kebijakan serta dalam rangka mewujudkan *Good Government Governance* (GGG), pemerintah diharapkan mampu menyajikan laporan keuangan dengan cara *full disclosure* dan berstandardisasi pada PP No 71 Tahun 2010.

Pemerintah daerah juga dapat mengemas informasi prestasi dan kinerja keuangan secara terperinci atau lebih lengkap untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan amanat yang diberikan oleh rakyat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah

melalui penyajian laporan keuangan diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari *agency theory* antara pihak legislatif dengan eksekutif serta diharapkan mampu menjunjung tinggi nilai akuntabilitas pemerintah di mata masyarakat atau publik.

#### **4. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan**

Aparatur pemerintah perlu memahami PP RI No 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang SAP yang digunakan sebagai persyaratan dan pedoman dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas, yaitu laporan pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah berdasarkan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah harus meninggalkan sistem akuntansi berbasis kas (*cash basis*) kemudian mengganti dengan basis akrual penuh (*full accrual*) dalam penyajian laporan keuangan pemerintah.

Menurut Guthrie (1998) definisi sistem akuntansi akrual adalah suatu metode pencatatan transaksi atas peristiwa dan pengakuan biaya (beban) berdasarkan periode terjadinya peristiwa atau transaksi tersebut, sedangkan metode *cash basis* merupakan proses pencatatan dan pengakuan peristiwa atau kejadian berdasarkan saat pembayaran. Sistem akrual mencatat biaya depresiasi suatu aset dibebankan ke periode waktu selama suatu aset tersebut digunakan berdasarkan biaya harga pembelian aset. Sistem akuntansi berbasis kas

mencatat biaya pengadaan aset tersebut dibebankan ke periode saat dilakukan pembayaran atas harga aset.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) pada tahun 2006 yang menyimpulkan bahwa akuntansi basis akrual merupakan suatu basis akuntansi yang mengakui, mencatat, serta menyajikan transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut. Permendagri No 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) juga menjelaskan bahwa basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hasil dari pengimplementasian basis akrual dapat menyajikan angka-angka akuntansi yang dianggap lebih informatif bagi pimpinan sektor publik dalam pengalokasian sumber daya yang dimiliki, dapat meningkatkan akuntabilitas serta pengambilan keputusan yang rasional. Hal tersebut mendorong aspek relevansi, netralitas, ketepatan waktu, kelengkapan dan komparabilitas kinerja keuangan suatu agen sektor publik menjadi perhatian para pimpinan organisasi pemerintah (Halim dan Kusufi, 2012).

Pengimplementasian SAP berbasis akrual paling lambat pada tahun 2015 ini, sehingga diharapkan pemerintah benar-benar memahami PP No 71 Tahun 2010 yang terdiri atas:

- a. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

- b. PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan
- c. PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
- d. PSAP 03 : Laporan Arus Kas
- e. PSAP 04 : Catatan atas Laporan Keuangan
- f. PSAP 05 : Akuntansi Persediaan
- g. PSAP 06 : Akuntansi Investasi
- h. PSAP 07 : Akuntansi Aset Tetap
- i. PSAP 08 : Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- j. PSAP 09 : Akuntansi Kewajiban
- k. PSAP 10 : Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan
- l. PSAP 11 : Laporan Keuangan Konsolidasian
- m. PSAP 12 : Laporan Operasional

Diharapkan dengan adanya pemahaman PP No 71 Tahun 2010 tersebut, pemerintah mampu menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun unsur-unsur laporan keuangan pemerintah terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

e. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera LRA, laporan perubahan SAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK.

## 5. Teknologi Informasi

PP No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dinyatakan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik, selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan untuk bekerja secara terpadu dengan cara menyederhanakan akses antar unit kerja.

PP No 56 Tahun 2005 juga menjelaskan mengenai pentingnya penguasaan teknologi informasi yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintah untuk mempersiapkan pergantian aturan dalam menyusun laporan keuangan yang menuntut efisiensi dan efektifitas. Penguasaan teknologi informasi harus diimbangi dengan perangkat pendukung yaitu peralatan yang menunjang berjalannya kegiatan atau pekerjaan



yang terdiri dari perangkat keras maupun perangkat lunak. Perangkat keras (*hardware*) seperti komputer untuk mengelola data menjadi informasi serta perangkat fisik lainnya yang mendukung output pekerjaan, sedangkan perangkat lunak (*software*) yaitu sekumpulan instruksi program-program atau aplikasi yang digunakan untuk mengendalikan dan mengoordinasikan perangkat keras komponen sebuah informasi.

Berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 pasal 225 disebutkan bahwa dalam pengisian dokumen penatausahaan bendahara pengeluaran dapat menggunakan aplikasi komputer dan atau alat elektronik lainnya, sehingga akan memudahkan dalam melakukan pencatatan dan menyusun laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi ini diharapkan dapat membantu aparat pemerintah dalam mengimplementasikan penerapan standar pengelolaan keuangan yang sebelumnya menggunakan kas basis modifikasi menjadi *full accrual basic*.

## **6. Kualitas Sumber Daya Manusia**

Menurut Widodo dalam Sibagriang (2013) kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup. Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat kuat dalam aktivitas yang akan

dijalankan organisasi, dalam hal ini termasuk organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang berkualitas akan memberikan kontribusinya secara lebih optimal, sehingga dapat mempengaruhi target kinerja yang sudah direncanakan.

Sumber daya manusia dituntut untuk selalu berkembang mengikuti perkembangan lingkungan sekitar, begitu pun pada perkembangan yang terjadi di instansi pemerintahan. SDM harus mempersiapkan bekal agar kemampuan intelektual dan perilaku yang dimiliki dapat menghadapi perkembangan lingkungan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperkuat pendidikan serta pelatihan-pelatihan, sehingga dapat memberikan pengalaman yang luas khususnya dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan.

Pendidikan erat kaitannya dengan sejauhmana seseorang mampu memahami perkembangan sosial, pikiran, kesehatan serta keyakinan, sedangkan pelatihan berkaitan dengan kemampuan untuk mengasah ketrampilan atau kemampuan berdasarkan tanggungjawab yang diemban. Diharapkan dengan adanya pendidikan dan pelatihan secara berkala dapat menambah pengalaman sumber daya manusia, sehingga semakin banyak pengalaman sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya maka semakin besar pula peluang dalam pencapaian target kerja. Hal tersebut jelas membantu aparatur pemerintah khususnya

bagian akuntansi atau keuangan dalam memahami serta mengimplementasikan SAP 2010, sehingga mampu menyajikan laporan keuangan yang mudah dipahami, akuntabel dan informatif.

## **7. Komitmen**

Menurut Simanjuntak dalam Sibagariang (2013) komitmen adalah kesanggupan untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dipercayakan kepada seseorang, komitmen tidak ada hubungannya sama sekali dengan bakat, kepintaran atau talenta. Semakin tinggi komitmen seseorang terhadap pekerjaan maka semakin tinggi pula usaha yang akan dilakukan dalam memenuhi tanggung jawab atas pekerjaan tersebut, namun rendahnya komitmen seseorang dapat mengakibatkan rendahnya tanggungjawab yang diberikan.

Pembahasan komitmen pada konteks pemerintah daerah, pegawai yang memiliki tingginya komitmen akan cenderung bergerak cepat dalam memahami adanya perubahan SAP. Pergerakan tersebut dapat membantu mempercepat SKPD dalam mengimplementasikan PP No 71 Tahun 2010. Komitmen yang tinggi mampu mengarahkan para pegawai untuk mengimplementasikan PP tersebut sehingga dapat menyajikan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual.

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis**

### **1. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis *full accrual* terhadap kemampuan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah**

Pemahaman SAP oleh seluruh pegawai SKPD diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan tanggung jawab yang telah diemban, khususnya dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah berbasis *full accrual* memberikan kontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang rasional oleh *stakeholder* atau pemangku kepentingan atau pengguna laporan keuangan. Pemahaman SKPD terhadap adanya perubahan SAP 2005 yang menjadi SAP 2010 perlu ditingkatkan dan segera diimplementasikan. Bagi SKPD yang tidak mampu atau tidak mau berusaha memahami perubahan peraturan tersebut, maka semakin sulit menuju tata kelola pemerintah yang baik. Hal tersebut dikarenakan terbuangnya waktu, tenaga dan pikiran yang sia-sia sehingga belum bisa menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Setiyaningsih (2013) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman aparatur pemerintah Surakarta terhadap SAP 2010 masih rendah, sehingga diperlukan pelatihan, sosialisasi serta pengadaan fasilitas yang mendukung terselenggaranya SAP 2010 tersebut. Penelitian oleh Faradillah (2013) menunjukkan bahwa para pengelola keuangan pemerintah kota

Makassar pada umumnya telah memahami pengertian dasar dari akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Penelitian yang hampir serupa juga dilakukan oleh Lestari (2013) menunjukkan bahwa pegawai yang bekerja di 15 dinas Kabupaten Bandung telah memahami dan menjadikan SAP sebagai dasar dalam penyajian laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman SAP berbasis *full accrual* berpengaruh signifikan terhadap penyajian laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Pemahaman SAP berbasis *full accrual* berpengaruh positif terhadap kemampuan penyajian laporan keuangan SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

## **2. Teknologi informasi terhadap kemampuan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan PP No 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah dinyatakan bahwa menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*), pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Peraturan ini juga menjelaskan pentingnya penguasaan teknologi informasi yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintah untuk mempersiapkan pergantian aturan dalam

menyusun laporan keuangan yang menuntut efisiensi dan efektifitas. Penguasaan teknologi informasi harus didukung dengan adanya perangkat pendukung, yaitu peralatan untuk mendukung terlaksananya kegiatan atau pekerjaan seperti komputer, *software*, aplikasi komputer, dan lain-lain, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah tersebut (*human error*).

Menurut penelitian Aidil (2010), menunjukkan bahwa perangkat pendukung berpengaruh terhadap kemampuan penyusunan LKPD, sehingga dengan adanya perangkat pendukung dalam pelaksanaan pekerjaan lebih efisien dan tepat waktu dalam penyajian LKPD. Berbeda dengan penelitian Sibagariang (2013) memperoleh hasil bahwa teknologi informasi atau sarana pendukung tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD pemerintah kota Sibolga. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Yulianto (2014) menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesiapan aparatur pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual pada penyusunan laporan keuangan pemerintahannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kemampuan penyajian laporan keuangan SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

### **3. Kualitas sumber daya manusia terhadap kemampuan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah**

Sumber daya manusia yang berkualitas dan didukung dengan latar belakang pendidikan, pemahaman, pelatihan serta pengalaman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sangat membantu pemerintah untuk mewujudkan GGG. Latar belakang pendidikan akuntansi yang dimiliki oleh SDM akan mempermudah dalam memahami perubahan SAP saat ini. Tingginya pelatihan yang diberikan kepada SDM juga akan memberikan pengalaman yang luas dan diharapkan mampu menyajikan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.

Penelitian Suharto (2012) menunjukkan bahwa kualitas SDM berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada inspektorat Kabupaten Kediri. Berdasarkan Tim Penelitian Kemendagri dalam Setiawati (2013) juga menunjukkan bahwa Pemda pada prinsipnya siap dan berkomitmen dalam menerapkan SAP berbasis akrual, sedangkan penelitian oleh Langelo, dkk (2015) menunjukkan bahwa Pemkot Bitung masih kekurangan SDM sehingga menjadi salah satu faktor kendala dalam menerapkan PP No 71 Tahun 2010. Hal tersebut menunjukkan bahwa SDM berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kemampuan penyajian laporan keuangan SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

#### **4. Pemahaman SAP berbasis *Full Accrual*, Komitmen dan Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Adanya pergantian SAP yang bermula pada PP No 24 Tahun 2005 menjadi PP No 71 Tahun 2010 mengharuskan seluruh SKPD untuk mempelajari, memahami dan mengimplementasikan SAP tersebut dalam pemerintahannya. Untuk mewujudkannya maka dibutuhkan komitmen yang tinggi terhadap pemahaman SAP baru tersebut, sehingga diharapkan SKPD mampu menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Penelitian Enho pada tahun 2008 menunjukkan bahwa pemahaman SAP tidak berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan daerah. Berbeda dengan penelitian Faradillah (2013) dan Lestari (2013) yang menunjukkan bahwa aparatur pemerintah telah memahami SAP berbasis akrual. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman SAP berpengaruh signifikan terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah masing-masing. Adanya perbedaan hasil penelitian tidak terlepas dari kuat lemahnya komitmen yang diterapkan dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Terdapat pengaruh interaksi komitmen dengan pemahaman SAP berbasis *full accrual* terhadap kemampuan penyajian laporan keuangan SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.



## **5. Tehknologi Informasi, Komitmen dan Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berkembangnya zaman berkaitan erat dengan pesatnya tehknologi informasi, sehingga pada saat ini banyak tehknologi informasi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut juga diterapkan dalam kehidupan di pemerintah. Komitmen yang kuat dibutuhkan dalam pemanfaatan tehknologi informasi tersebut, karena apabila sudah tersedia tehknologi yang canggih namun tidak diimplementasikan sebaik mungkin, maka akan menjadi sia-sia.

Fenomena yang terjadi saat ini masih banyak pemerintah daerah yang belum menguasai tehknologi informasi sebaik mungkin. Bagi aparatur pemerintah yang sudah mulai memasuki usia tua cenderung sulit untuk mengikuti perkembangan tehknologi. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen yang masih ditemukan di lingkungan pemerintah. Sebenarnya dengan komitmen yang tinggi dapat menumbuhkan besarnya rasa keingintahuan seseorang untuk dapat memanfaatkan tekhnologi informasi secara optimal, khususnya dalam proses penyusunan dan penyajian LKPD.

Peneliti terdahulu yaitu Andriani (2010) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh pada tingkat ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang serupa telah dilakukan oleh Kusuma (2013) menunjukkan bahwa indikator sarana prasarana di Kabupaten Jember cukup siap digunakan dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual. Penelitian Ratifah dan Ridwan (2012) menyatakan bahwa dalam

pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah, memerlukan komitmen organisasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen sangat berpengaruh dalam penggunaan teknologi informasi untuk membantu penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>5</sub> : Terdapat pengaruh interaksi komitmen dengan teknologi informasi terhadap kemampuan penyajian laporan keuangan SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

## **6. Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen dan Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

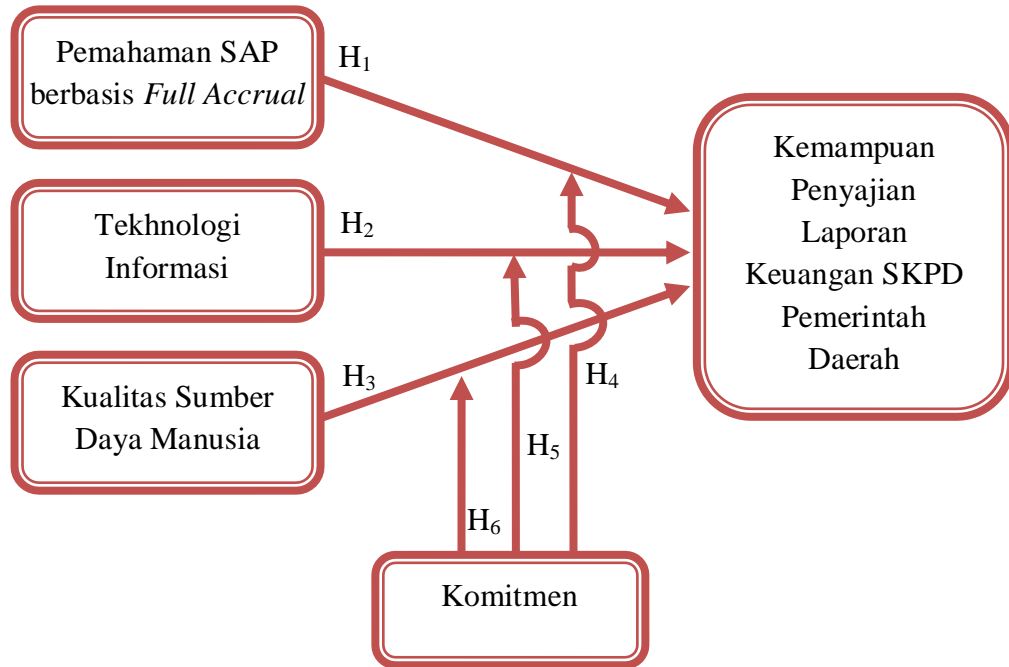
Komitmen tidak bisa terlepas dari kualitas yang dimiliki SDM. Komitmen sebagai poros awal SDM dalam menciptakan rasa loyalitas terhadap organisasinya. Semakin tinggi tingkat komitmen yang dimiliki SDM, maka semakin tinggi pula usaha yang dilakukan dalam rangka memenuhi kewajibannya, khususnya dalam hal penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Tanpa adanya komitmen, pekerjaan seringkali apa pun itu dapat mempengaruhi loyalitas atau kinerja yang cenderung tidak optimal. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang berstandarisasi pada basis *full accrual* saat ini.

Diharapkan dengan adanya komitmen yang semakin kuat, dapat mempercepat proses pemahaman terhadap perubahan SAP.

Fenomena di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sibagariang (2013), dengan adanya komitmen yang kuat maka seseorang akan mengeluarkan sumber daya fisik, mental, dan spiritual tambahan yang bisa diperoleh, begitu sebaliknya tanpa adanya komitmen, pekerjaan-pekerjaan akan sulit untuk terlaksana. Berdasarkan Tim Penelitian Kemendagri dalam Setiawati (2013) menunjukkan bahwa Pemda pada prinsipnya siap dan berkomitmen dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Sulani dalam Pandey (2014) menunjukkan bahwa komitmen berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan SAP. Berbeda dengan penelitian Langelo, dkk (2015) yang menunjukkan bahwa Pemkot Bitung masih kekurangan SDM sehingga menjadi salah satu faktor kendala dalam menerapkan PP No 71 Tahun 2010. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>6</sub> : Terdapat pengaruh interaksi komitmen dengan sumber daya manusia terhadap kemampuan penyajian laporan keuangan SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

### C. Model Penelitian



**Gambar 2.1.**  
**Paradigma Penelitian**